

AKUNTANSI MANAJEMEN

Kebijakan Anggaran & Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan satuan lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan secara formal. Untuk menjaga kualitasnya, maka akan dinilai oleh lembaga independen Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT). Badan Akreditasi Nasional melakukan pengawasan dengan memberi level tingkatan akreditasi baik kepada institusi nya maupun kepada tingkat Program Studinya.

Dalam pemenuhan akreditasi program studi yang diberikan oleh BAN-PT berdasarkan kriteria dan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan standar sangat tergantung kepada sejauh mana perguruan tinggi harus memenuhi standar yang terkait dengan pemenuhan secara internal dan eksternal yang keduanya harus bersandar pada tri darma perguruan tinggi. Operasionalisasi tri darma perguruan tinggi harus sejalan dengan kemampuan perguruan tinggi menyiapkan anggaran untuk melakukan kegiatan akademik yang berbasis akreditasi sehingga dukungan pemenuhan kebutuhan harus terpenuhi secara maksimal.



PT Mafy Media Literasi Indonesia
ANGGOTA IKAPI (041/SBA/2023)
Email: penerbitmafya@gmail.com
Website: penerbitmafya.com



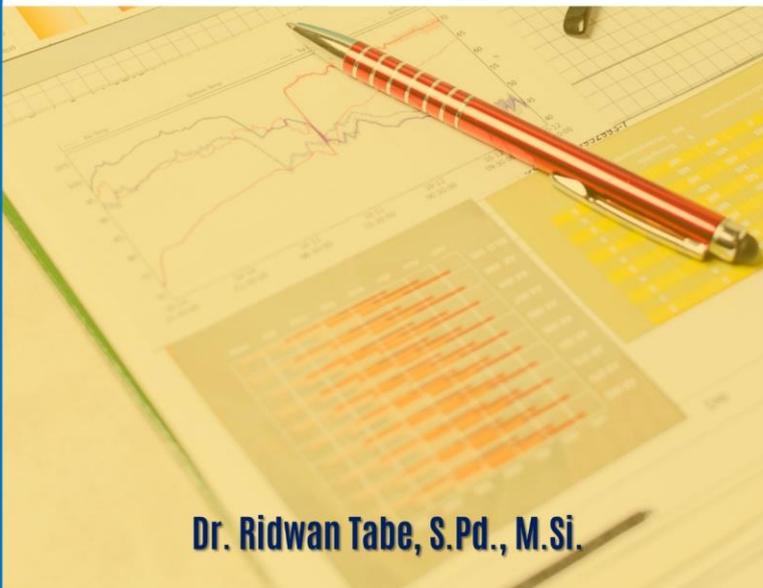
AKUNTANSI MANAJEMEN Kebijakan Anggaran & Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Dr. Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.



AKUNTANSI MANAJEMEN

Kebijakan Anggaran & Biaya Operasional Perguruan Tinggi



Dr. Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.

AKUNTANSI MANAJEMEN

**Kebijakan Anggaran & Biaya
Operasional Perguruan Tinggi**

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

AKUNTANSI MANAJEMEN

Kebijakan Anggaran & Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Dr. Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.



AKUNTANSI MANAJEMEN Kebijakan Anggaran & Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Penulis:

Dr. Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.

Editor:

Lilly Anggrayni, M.S.A.

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

viii, 72 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8390-71-7

Cetakan Pertama:

September 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
BAB I MENIMBANG KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI	1
BAB II KONSEP KEBIJAKAN ANGGARAN	5
BAB III ANGGARAN PUBLIK	11
A. Kebijakan Anggaran	14
B. Prinsip Anggaran	15
BAB IV DESAIN ANGGARAN PENDIDIKAN	17
A. Pengertian Biaya Operasional	18
B. Tujuan Biaya Operasional	20
BAB V KONSEP KINERJA PROGRAM STUDI	21
A. Pengertian Kinerja	21
B. Motivasi Kinerja.....	25
C. Indikator Penilaian Kinerja	27
BAB VI KONSEP TINGKAT AKREDITASI	29
A. Pengertian Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi	29
B. Tujuan Akreditasi	30
C. Nilai Dan Peringkat Akreditasi	30

BAB VII ANALISIS KELAYAKAN AKUNTANSI MANAJEMEN	
PERGURUAN TINGGI	49
A. Menenal Perguruan Tinggi	49
B. Analisis Kelayakan	55
BAB VIII DAMPAK KEBIJAKAN ANGGARAN DAN BIAYA	
OPERASIONAL	59
A. Kebijakan Anggaran Terhadap Tingkat Akreditasi	59
B. Biaya Operasional Terhadap Tingkat Akreditasi ..	60
C. Kebijakan Anggaran Terhadap Kinerja Prodi	61
D. Biaya Operasional Terhadap Kinerja Prodi	62
E. Kinerja Prodi Terhadap Tingkat Akreditasi	63
BAB IX KEBERLANJUTAN UNTUK MASA DEPAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
PROFIL PENULIS	71

PRAKATA

Segenap rasa syukur yang tak pernah henti penulis persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan dan petunjuk dari-Nya yang tak henti-hentinya penulis terima, hingga saat ini penulis telah menyelesaikan sebuah buku referensi ini dengan judul AKUNTANSI MANAJEMEN Kebijakan Anggaran & Biaya Operasional Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi merupakan satuan lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan secara formal. Untuk menjaga kualitasnya, maka akan dinilai oleh lembaga independen Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT). Badan Akreditasi Nasional melakukan pengawasan dengan memberi level tingkatan akreditasi baik kepada institusi nya maupun kepada tingkat Program Studinya.

Dalam pemenuhan akreditasi program studi yang diberikan oleh BAN-PT berdasarkan kriteria dan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan standar sangat tergantung kepada sejauh mana perguruan tinggi harus memenuhi standar yang terkait dengan pemenuhan secara internal dan eksternal yang keduanya harus bersandar pada

tri darma perguruan tinggi. Operasionalisasi tri darma perguruan tinggi harus sejalan dengan kemampuan perguruan tinggi menyiapkan anggaran untuk melakukan kegiatan akademik yang berbasis akreditasi sehingga dukungan pemenuhan kebutuhan harus terpenuhi secara maksimal.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian buku ini. Kepada keluarga, rekan dan seluruh tim Penerbit PT Mafy Media Literasi Indonesia yang telah melakukan proses penerbitan, cetak, dan distributor terhadap buku kami, penulis haturkan terima kasih.

Penulis menanti saran konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan pada masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dan khazanah informasi. Sebagaimana peribahasa tak ada gading nan tak retak, mohon dimaafkan segala kekeliruan yang ada pada terbitan ini. Segala kritik dan saran, tentu akan diterima dengan tangan terbuka.

Penulis

BAB I

MENIMBANG KUALITAS

Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan satuan lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan secara formal. Sebagaimana penjelasan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 12 thn 2012 mengenai pendidikan tinggi yang mencakup pendidikan tingkat menengah, diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis. Status pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari dua yakni pendidikan tinggi negeri dibawah naungan pemerintah dan status pendidikan tinggi dibawah naungan yayasan, namun keduanya mendapatkan kedudukan yang sama dalam menjaga kualitas untuk memberikan kepuasan kepada masing-masing konsumen atau pengguna.

Lembaga pendidikan tinggi dalam menjaga kualitasnya, maka akan dinilai oleh lembaga independen Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT). Badan Akreditasi Nasional melakukan pengawasan dengan memberi level

tingkatan akreditasi baik kepada institusi nya maupun kepada tingkat Program Studinya. Pada tahun 2021 ada sebanyak 96 lembaga pendidikan tinggi dan 1.728 mendapat akreditasi A. Sementara di wilayah Sulawesi terdapat 5 Perguruan Tinggi negeri dibawah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berstatus perguruan tinggi yang sudah ter akreditasi. Sedangkan Prodi sekitar 90 Program Studi.

Pentingnya akreditasi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT program studi di perguruan tinggi pertama memberikan jaminan bahwa program studi dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu. Kedua memberikan dorongan setiap program studi untuk melakukan peningkatan dan perbaikan sistem pengelolaan yang baik. Ketiga nilai akreditasi memberikan dampak positif yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Tingkat akreditasi diperoleh berdasarkan kriteria yang telah diatur dalam lampiran panduan BAN-PT Nomor 3 thn 2019 terkait tentang sistem Akreditasi lembaga

pendidikan tinggi dan sistem akreditasi Prodi, kriteria yang ditetapkan dalam akreditasi yang berpedoman pada SNPT. Kriteria akreditasi yang diatur dalam Standar Nasional diuraikan dalam penilaian dengan pertimbangan interaksi dengan standar nasional pendidikan Tinggi yang dapat mengukur tingkat capaian kualitas pendidikan tinggi. Karena akreditasi bukan hanya menilai tentang pemenuhan dan kelengkapan administrasi tetapi juga menilai tentang kinerja, maka dalam menilai tingkat akreditasi perlu mempertimbangkan tingkat capaian yang melebihi standar nasional pendidikan tinggi. Dalam menilai akreditasi dilakukan dengan melibatkan pusat pangkalan data pendidikan tinggi.

Dalam pemenuhan akreditasi program studi yang diberikan oleh BAN-PT berdasarkan kriteria dan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan standar sangat tergantung kepada sejauh mana perguruan tinggi harus memenuhi standar yang terkait dengan pemenuhan secara internal dan eksternal yang keduanya harus bersandar pada tri darma perguruan tinggi. Operasionalisasi tri darma perguruan tinggi harus sejalan dengan kemampuan perguruan tinggi menyiapkan anggaran untuk melakukan kegiatan akademik yang berbasis akreditasi sehingga dukungan pemenuhan kebutuhan harus terpenuhi secara maksimal.

BAB II

KONSEP KEBIJAKAN

Anggaran

adanya kesatuan antara input proses output. Dimana setiap penambahan input maka output semakin meningkat, kombinasi faktor-faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, teknologi, tenaga kerja akan menambah satu nilai dan menciptakan nilai yang lain.

David Ricardo (1965)

Anggaran adalah pengalokasian sumber daya finansial untuk mendukung terselenggaranya segala aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan suatu kebijakan publik (Jones, 2010). Mengacu kepada definisi ini maka anggaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan publik dapat terlaksana. Anggaran publik menggambarkan apa yang pemerintah lakukan dengan mendaftarkan berbagai program dan bagaimana

pemerintah membelanjakan uang. Anggaran menghubungkan tugas-tugas yang harus dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas/permasalahan publik, dan memastikan bahwa uang akan tersedia dalam melaksanakan program/kebijakan pemerintah.

Anggaran membatasi pengeluaran untuk pendapatan yang tersedia, dan memastikan keseimbangan dan mencegah pengeluaran berlebihan. Anggaran melayani banyak fungsi penting dalam pemerintahan, di satu sisi, anggaran adalah kontrak tahunan yang disetujui oleh eksekutif dan legislatif yang memungkinkan lembaga dan departemen eksekutif mengumpulkan dan membelanjakan dana publik dengan cara tertentu untuk tahun fiskal mendatang (Rubin, 1992)

Inti dari penganggaran adalah mengalokasikan sumber daya yang langka dan karenanya menyiratkan pilihan antara objek potensial pengeluaran. Penganggaran menyiratkan keseimbangan, dan itu membutuhkan semacam proses pengambilan keputusan. Semua penganggaran melibatkan pilihan-pilihan diantara kemungkinan pengeluaran, dengan alasan bahwa tidak ada yang memiliki sumber daya tidak terbatas, orang-orang selalu akan melakukan penganggaran, dan biasanya penganggaran tidak dilakukan dengan

membandingkan hanya dua item serupa yang masuk akal. Penganggaran biasanya membatasi pilihan untuk dipertimbangkan dengan mengelompokkan hal-hal serupa yang dapat dibandingkan secara wajar.

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan organisasi dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali.

Ada beberapa pengertian yang diberikan mengenai anggaran oleh para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Pebrianti, (2018)

Suatu rencana keuangan yang disusun berdasarkan secara periodik yang disesuaikan dengan pos atau program yang sudah di sahkan

2. Styaningsih, (2018).

Suatu alat pencatatan yang dijadikan sebagai instrumen yang membantu institusi dalam merencanakan serta mengendalikan operasional institusi

3. Raharjo, (2019).

Suatu sumber daya yang mengharapkan perolehan selama periode waktu tertentu

4. Prakoso (2017)

Suatu perencanaan yang tertulis tentang kegiatan organisasi yang dapat dinyatakan dalam kuantitatif untuk waktu tertentu dan pada umumnya dituangkan dalam bentuk satuan uang.

5. Menurut Kurnia (2021)

Rencana yang diuraikan mengenai perolehan dan kegunaan sumber keuangan dan sumber daya yang lain selama satu periode.

Beberapa definisi tersebut maka anggaran diartikan bahwa satuan nilai uang yang memiliki sumber daya yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur suatu pencapaian efisien dan efektif dari setiap kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam penyusunan Anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut :

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan
2. Data-data tahun sebelumnya
3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak-gerik pesaing.
5. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah

6. Penelitian untuk pengembangan organisasi

Dalam penyusunan Anggaran perlu diperhatikan perilaku para pelaksana Anggaran dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Anggaran harus dibuat serelistis dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi (Anggaran yang dibuat terlalu rendah menggambarkan tidak adanya kedinamisan, sedangkan Anggaran yang terlalu tinggi hanyalah angan-angan)
2. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi termotivasi.
3. Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi sejak dini.

BAB III

ANGGARAN

Publik

PENGANGGARAN publik dan non publik mempunyai karakteristik secara umum namun berbeda dari penganggaran rumah tangga dan bisnis dalam beberapa hal yaitu;

1. Pada anggaran publik selalu ada orang dan organisasi dengan perspektif dan tujuan yang berbeda, mereka mencoba mendapatkan apa yang mereka inginkan dari anggaran;
2. Anggaran publik lebih terbuka kepada lingkungan;
3. Anggaran publik memiliki keterkaitan penting antara warga negara pembayar pajak dengan pejabat pemerintah. Dokumen anggaran itu sendiri dapat menjadi bentuk utama akuntabilitas;

4. Anggaran publik dicirikan dengan berbagai kendala, batasan hukum, batasan yang dirasakan oleh opini publik, peraturan dan regulasi tentang bagaimana melaksanakannya.

Anggaran publik bukan hanya sekadar dokumen manajerial teknis, tetapi pada hakikatnya juga bersifat politis dan dapat direduksi. Terdapat beberapa pandangan tentang anggaran;

1. Anggaran mencerminkan tentang pilihan-pilihan tentang apa yang pemerintah akan lakukan dan tidak dilakukan;
2. Anggaran mencerminkan proporsi relatif dari keputusan yang dibuat untuk tujuan lokal dan daerah pemilihan, dan untuk efisiensi, efektivitas, dan tujuan publik yang lebih luas;
3. Anggaran memberikan alat pertanggungjawaban yang kuat kepada warga negara yang ingin mengetahui bagaimana pemerintah membelanjakan uang berdasarkan pilihan warga negara;
4. Anggaran mencerminkan preferensi warganegara untuk berbagai bentuk perpajakan dan berbagai tingkat perpajakan, serta kemampuan kelompok-kelompok wajib pajak untuk mengalihkan beban pajak kepada orang lain;
5. Pada level nasional anggaran anggaran memengaruhi perekonomian, jadi kebijakan fiskal memengaruhi

tingkat ketenagakerjaan berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan setiap saat;

6. Anggaran mencerminkan kekuatan relatif individu dan organisasi yang berbeda untuk mempengaruhi hasil anggaran. Pembuatan keputusan anggaran memberikan gambaran tentang kekuatan relatif para aktor anggaran di dalam dan di antara cabang-cabang pemerintahan, serta pentingnya warga negara dalam urusan umum dan khusus.

Mardiasmo (2009: 62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Sumarsono (2009:57) penganggaran merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan

kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

A. KEBIJAKAN ANGGARAN

Meyer Rath, *et al.* (2020) menguraikan kebijakan anggaran adalah: Kebijakan anggaran merupakan kebijakan di bidang fiskal dengan membandingkan antara nilai penerimaan dan pengeluaran. Penjelasan: Kebijakan fiskal memiliki beberapa instrumen, salah satunya adalah kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut:

1. Anggaran berimbang berarti jumlah penerimaan dan pengeluaran seimbang
2. Anggaran tidak berimbang berarti antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran tidak seimbang. Anggaran tidak berimbang dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut:
 - a. Anggaran surplus berarti jumlah penerimaan lebih banyak daripada jumlah pengeluaran dan biasanya diterapkan ketika inflasi.
 - b. Anggaran defisit adalah jumlah penerimaan lebih sedikit daripada jumlah pengeluaran dan biasanya diterapkan ketika terjadi resesi.

B. PRINSIP ANGGARAN

Bella (2020) menjelaskan prinsip-prinsip dasar anggaran sebagai berikut:

1. Transparan

Suatu tindakan atau perilaku yang bersifat keterbukaan kepada semua pihak atas informasi yang ada dalam suatu organisasi atau instansi.

2. Partisipatif

Keterlibatan suatu kelompok dalam proses penentuan anggaran untuk memberikan jaminan yang sesuai antara kebutuhan dan memberikan kontribusi atas keterlibatan dalam proses penganggaran tersebut.

3. Disiplin

Dalam menyusun anggaran harus berorientasi kepada kebutuhan kelompok, tanpa meninggalkan keseimbangan dengan pembiayaan penyelenggaraan institusi. Disiplin dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan terkait dengan ketepatan waktu dan menghindari kebocoran dan pemborosan.

4. Keadilan

Penentuan anggaran wajib mengalokasikan penggunaannya dengan adil, sehingga semua unsur dapat menikmati, tanpa membedakan satu pihak dengan pihak yang lain.

5. Efisiensi dan Efektivitas

Memanfaatkan dana yang sebaik baiknya dalam rangka menghasilkan dan memberikan peningkatan kesejahteraan kelompok secara maksimal, sehingga dalam perencanaan harus ditetapkan secara jelas untuk memperoleh manfaat yang efisien dan efektif.

6. Rasionalisasi dan Terukur

Dalam penyusunan anggaran baik terkait sisi pendapatan ataupun sisi pengeluaran harus mengedepankan aspek rasional anggaran dan diukur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 PP No. 105 Thn 2000, yaitu 1) besarnya pendapatan yang harus dianggarkan adalah perkiraan yang terukur dengan rasional yang dicapai setiap pendapatan; 2) besarnya belanja yang telah dianggarkan adalah batas maksimal setiap pembelanjaan.

BAB IV

DESAIN ANGGARAN

Pendidikan

Adapun desain anggaran pendidikan adalah:

1. Anggaran butir per-butir, adalah model anggaran pendidikan dimana pengeluarannya dikelompokkan sesuai kategori, misalnya biaya gaji, biaya upah, biaya honor dijadikan satu kategori dalam satu butir.
2. Anggaran program adalah model anggaran yang dapat dirancang dengan mengidentifikasi pembiayaan setiap program pendidikan. Dimana anggaran biaya butir per-butir dihitung sesuai jenis butir yang dibeli, sedangkan anggaran untuk program biaya dihitung berdasarkan jenis setiap program.
3. Anggaran sesuai hasil adalah model penganggaran yang menekankan hasil dari suatu alokasi penganggaran.

A. PENGERTIAN BIAYA OPERASIONAL

Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan ke dalam dua komponen utama, yaitu Biaya Langsung (BL) dan Biaya Tidak Langsung (BTL). Biaya langsung merupakan biaya operasional satuan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi. Biaya langsung terdiri atas kegiatan kelas, kegiatan laboratorium/studio/ bengkel/ lapangan, kegiatan tugas akhir /proyek akhir/skripsi; dan bimbingan konseling dan kemahasiswaan. Sedang Biaya tidak langsung merupakan biaya operasional satuan yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum program studi yang diperlukan untuk pengelolaan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan program studi.

Biaya tidak langsung terdiri atas biaya administrasi umum, pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan institusi, dan biaya operasional lainnya. Untuk menyederhanakan perhitungan BL, program studi dikelompokkan berdasarkan keragaman struktur biaya operasional penyelenggaraan program studi, mulai dari program studi yang penyelenggaraannya didominasi kegiatan perkuliahan di kelas, hingga program studi yang memerlukan kegiatan praktikum dengan bahan dan peralatan yang membutuhkan biaya tinggi.

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSB OPT adalah besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan program studi setiap mahasiswa dalam 1 (satu) tahun. Pada pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Jenis Program Studi dan Indeks kemahalan wilayah. Standar tersebut menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk PTN menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa yang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya.

Menurut Casmadi, (2019) mengungkapkan bahwa biaya operasional adalah kelompok biaya yang digunakan untuk mendapatkan membiayai kegiatan utama. Menurut Jumirin (2018) bahwa biaya operasional adalah sekelompok biaya yang menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan usaha.

berdasarkan definisi diatas maka Biaya operasional prodi dapat disimpulkan bahwa sekelompok biaya yang telah dialokasikan untuk membiayai sejumlah program yang telah ditetapkan oleh program studi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RA-AKL).

B. TUJUAN BIAYA OPERASIONAL

Pasca, (2019) menguraikan tujuan biaya operasional adalah:

1. Memberikan koordinasi dan melakukan pengendalian arus masukan dan keluaran, serta pengelolaan sumber daya yang ada agar setiap kegiatan dapat beroperasi dengan efektif.
2. Mengambil keputusan, pencatatan biaya dan menyediakan informasi biaya masa pada masa mendatang karena setiap pengambilan keputusan selalu berhubungan masa depan.
3. Digunakan sebagai pedoman bagi pihak manajemen dalam melakukan setiap kegiatan perusahaan yang telah direncanakan.

BAB V

KONSEP KINERJA

Program Studi

A. PENGERTIAN KINERJA

Dalam sistem pendidikan global yang merupakan sistem tanpa batas-batas negara yang secara bertahap menjadi kenyataan, lingkungan pendidikan cepat sekali berubah. Terutama dengan didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang semakin pesat, lembaga pendidikan menjanjikan kesempatan setiap orang di mana saja untuk akses ke yang terbaik di seluruh dunia.

Manajemen merupakan suatu proses yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, karena dalam proses manajemen terdapat langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Selain proses manajemen yang perlu diperhatikan dalam sebuah instansi atau organisasi, kinerja dalam sebuah instansi juga perlu

diperhatikan. Karena, kinerja merupakan hasil kerja dan juga penilaian atas kerja seseorang yang berkecimpung dalam dunia kerja sebuah instansi. Oleh karenanya, kinerja juga membutuhkan manajemen, agar hasil yang diperoleh dapat maksimal.

Pengertian Kinerja menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: (Veithzal Rivai dan Ahmad Fawzi, 2005)

1. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and Keeps, 1992)
2. Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja (Griffin, 1987)
3. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blanchard, 1993)
4. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik

- dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donelly, Gibson and Ivancevich, 1994)
5. Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1991)
 6. Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan (Ability=A), motivasi (motivation=M) dan kesempatan (Opportunity=O) atau Kinerja = $f(A \times M \times O)$; artinya: kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan (Robbins,1996).
 7. Kinerja adalah tingkat keberhasilan yang dimiliki setiap orang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah diberikan kepadanya yang melekat sebagai tanggung jawab (Rialmi, 2020).
 8. Kinerja adalah suatu pencapaian dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan berdasarkan kriteria tertentu (Fauzi, 2020).

Dengan demikian, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Dari kedua kata manajemen dan kinerja, jika digabungkan menjadi satu kata baru yaitu Manajemen Kinerja (Performance Management). Beberapa definisi

diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut: (Wibowo, 2007)

1. Manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan (Bacal, 1994).
2. Manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati (Armstrong, 2004)
3. Manajemen kinerja merupakan gaya manajemen yang dasarnya adalah komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan yang menyangkut penetapan tujuan, memberikan umpan balik baik dari manajer kepada karyawan maupun sebaliknya (Schwartz, 1999)
4. Manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan penting yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja dan alokasi sumber daya (Costello, 1994)
5. Dengan memperhatikan pendapat para ahli, maka dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber

daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi.

B. MOTIVASI KINERJA

Hasibuan (2005:342) ada beberapa pengertian motivasi. Menurut Hasibuan motivasi adalah: "Pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seorang, agar mereka mau bekerja sama. Bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan." Sedangkan Menurut Handoko (2010:143), motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

Motivasi kerja menurut Siagian (2002:89) sebagai daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya, dengan pengertian bahwa tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengertian motivasi kerja menurut Hasibuan (2008:132) adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang, agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai tujuan. Menurut Maslow yang dikutip oleh Hasibuan (2008:157) bahwa motivasi kerja pegawai dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, ketuhanan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan akan perwujudan diri.

Kemudian dari faktor tersebut maka indikator untuk mengetahui tingkat motivasi pada karyawan, yaitu:

1. kebutuhan fisik, ditunjukkan dengan: pemberian gaji, pemberian bonus, uang makan, uang transport, fasilitas perumahan dan sebagainya.
2. kebutuhan rasa aman dan keselamatan, ditunjukkan dengan: fasilitas keamanan dan keselamatan kerja yang diantaranya jaminan sosial tenaga kerja, dana pensiun,

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dan perlengkapan keselamatan kerja.

3. kebutuhan sosial, ditunjukkan dengan: melakukan interaksi dengan orang lain yang diantaranya untuk diterima di kelompok dan kebutuhan untuk dicintai dan mencintai.
4. kebutuhan akan penghargaan, ditunjukkan dengan: pengakuan dan penghargaan berdasarkan kemampuannya yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh pegawai lain dan pimpinan terhadap prestasi kerja.
5. kebutuhan perwujudan diri, ditunjukkan dengan sifat pekerjaan yang menarik dan menantang, dimana pegawai tersebut mengerahkan kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan potensinya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

C. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

Menurut Massie (2018) menyebutkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Mutu:

Personalia diukur dengan kualitas kerja dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas dalam suatu organisasi.

2. Kuantitas:

Jumlah hasil yang diperoleh yang sesuai dengan target pencapaian

3. Ketepatan waktu:

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan.

4. Efektif penggunaan sumber daya:

Kemampuan personalia dalam menggunakan sumber daya yang ada secara efektif.

5. Mandiri:

Kemampuan personalia melaksanakan pekerjaan secara mandiri, meskipun pekerjaan seringkali dikerjakan secara tim

6. Berkomitmen:

Memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

BAB VI

KONSEP TINGKAT

Akreditasi

A. PENGERTIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

Menurut Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi no. 5 thn 2020 bahwa Akreditasi merupakan pengakuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang memiliki otonomi dengan kemampuan yang bersifat independen untuk menetapkan suatu syarat dan kriteria tertentu yang dapat dijadikan sebagai suatu standar yang berlaku secara umum (Legowo, 2017). Akreditasi program studi adalah suatu pengakuan atau jaminan kualitas yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Akreditasi Prodi adalah suatu proses mengevaluasi dan pemberian nilai dengan komprehensif sesuai komitmen

Prodi terhadap mutu kapasitas yang diselenggarakan program sesuai tri darma perguruan tinggi, dalam rangka untuk menentukan layak atau tidaknya program akademiknya. Evaluasi serta penilaian akreditasi Prodi dilakukan oleh assessor yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu. berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.

B. TUJUAN AKREDITASI

Tujuan akreditasi Program Studi adalah:

1. Sebagai pengakuan dan pengukuran mutu dari masyarakat
2. Sebagai pendorong lembaga pendidikan untuk mengalami perkembangan yang terus menerus
3. Sebagai hasil capaian dari suatu lembaga pendidikan tinggi

C. NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI

Nilai akreditasi Prodi merupakan tingkat komitmen yang diperlihatkan Unit Pengelola program studi yang telah menjabarkan dalam sistem akreditasi yang menganut pada 7 standar atau 9 kriteria yang dijelaskan dalam buku acuan standar akreditasi. Dimana setiap pada masing-masing standar memiliki pemenuhan dokumen dan penjabaran

kerja dari masing-masing dokumen tersebut. Nilai setiap butir disandarkan pada matris penilaian.

Adapun peringkat akreditasi menurut peraturan akreditasi nasional Perguruan Tinggi nomor 1 tahun 2000 mekanisme akreditasi dijelaskan bahwa rentang skor APS dan status dan peringkat APS sebagai berikut:

Tabel 4.1. Skor Nilai Akreditasi

No	Rentang Nilai APS	Keterangan
1.	Nilai ≥ 361	Akreditasi Unggul
2.	$300 < \text{Nilai} \leq 361$	Akreditasi Baik Sekali
3.	$200 < \text{Nilai} \leq 300$	Akreditasi Baik
4.	$200 < 200$	Tidak Ter akreditasi

Elemen Akreditasi

Kriteria akreditasi adalah patokan akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai rujukan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (compliance), namun juga menilai kinerja (performance) program studi dan unit pengelolanya, maka penilaian akreditasi

mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. BAN-PT menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi melalui unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut:

Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama

Kriteria 3 Mahasiswa

Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Kriteria 6 Pendidikan

Kriteria 7 Penelitian

Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Penilaian difokuskan pada kejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi oleh unit pengelola program studi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan berdasarkan misi dan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian:

1. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.
2. Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.
3. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama

Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumber daya, sistem penjaminan mutu, sistem komunikasi dan teknologi informasi, program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu, serta terbangun dan terselenggaranya kerja sama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.

Mahasiswa

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta program dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.

Sumber Daya Manusia

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan

prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (availability) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (accessibility), kegunaan atau pemanfaatan (utility) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1. Sistem Tata Pamong:

- a. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi di UPPS.
- b. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil).

2. Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial:

- a. Komitmen pimpinan UPPS.
- b. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

3. Kerjasama:

- a. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti

- yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; 3) memberikan kepuasan kepada mitra; dan 4) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- b. Realisasi kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.
 - c. Realisasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.
4. Indikator kinerja tambahan: indikator kinerja yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI.
5. Evaluasi capaian kinerja: analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria (capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian

standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan).

6. Penjaminan mutu: keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.
7. Kepuasan pemangku kepentingan: pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan, seperti: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan

dosen dan mahasiswa; dan 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

Mahasiswa

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta program dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1. Kualitas input mahasiswa:
metoda rekrutmen dan keketatan seleksi, minat calon mahasiswa, peningkatan jumlah calon mahasiswa.
2. Keberadaan mahasiswa asing.
3. Layanan kemahasiswaan:
 - a. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat; 2) bimbingan karir dan kewirausahaan, dan 3) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).
 - b. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.

Pendidikan

Penilaian Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sumber Daya Manusia

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1. Profil dosen:
 - a. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.
 - b. Kualifikasi akademik dosen tetap.

- c. Sertifikasi profesi/kompetensi/industri dosen tetap.
 - d. Jabatan akademik dosen tetap.
 - e. Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah dosen tetap.
 - f. Beban kerja dosen tetap sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa.
 - g. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap.
 - h. Dosen tidak tetap.
 - ix. Keterlibatan dosen industri/praktisi.
2. Kinerja dosen
- a. Pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap.
 - b. Kegiatan penelitian dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi.
 - c. Kegiatan PkM dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi.
 - d. Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi.
 - e. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dosen tetap.
 - f. Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi.
3. Pengembangan dosen: upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.
4. Tenaga kependidikan:

- a. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.).
- b. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

Keuangan, Sarana dan Prasarana

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (availability) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (accessibility), kegunaan atau pemanfaatan (utility) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1. Keuangan:
 - a. Biaya operasional pendidikan.
 - b. Dana penelitian dosen tetap.
 - c. Dana PkM dosen tetap.

- d. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
 - e. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
2. Sarana dan prasarana: kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

Pendidikan

Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1. Kurikulum:
 - a. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
 - b. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.

- c. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
2. Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat:
 - 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
3. Rencana proses pembelajaran:
 - i. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).
 - ii. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran:
 - a. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar
 - b. Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN-Dikti Penelitian

Penelitian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan

program studi dan perguruan tinggi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1. Relevansi penelitian: relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.
2. Penelitian dosen dan mahasiswa: i. Penelitian dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi. ii. Penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi.

Pengabdian kepada Masyarakat

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan

kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1. Relevansi PkM: relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.
2. PKM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.

Luaran dan Capaian Tridharma

Penilaian difokuskan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada

KKNI, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

1. Luaran dharma pendidikan:

- a. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup: 1) keserba cakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
- b. IPK lulusan.
- c. Prestasi mahasiswa di bidang akademik.
- d. Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik.
- e. Masa studi. vi. Kelulusan tepat waktu.
- f. Keberhasilan studi.
- g. Pelaksanaan *tracer study*

2. Luaran dharma penelitian dan PkM:

- a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.

- b. Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang disitasi.
- c. Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat.
- d. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap.

BAB VII

ANALISIS KELAYAKAN

AKUNTANSI MANAJEMEN

Perguruan Tinggi

A. MENGENAL PERGURUAN TINGGI

Gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam telah dimiliki umat Islam sejak zaman Belanda. Diawali oleh DR Satiman Wirjosandjojo dengan mendirikan Pesantren Luhur tahun 1983 namun akhirnya gagal karena intervensi penjajah Belanda. Beberapa tokoh nasional seperti M Hatta, M Natsir, Wahid Hasyim, Mas Mansur turut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta pada tahun 1945 dibawah kepemimpinan Abdul Kahar Muzakar. Masa revolusi kemerdekaan STI pindah ke Yogyakarta karena ibukota pindah kesana sampai akhirnya tahun 1984.

Berdirinya sekolah tinggi Islam juga tidak lepas dari kebijakan politik atas dua kelompok besar yakni nasionalis

dan kelompok Islam. Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikan umat Islam atau mengakomodasi umat, pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang dipecah dari Fakultas Agama di UII Yogyakarta yang dijadikan statusnya dengan nama PTAIN bertempat di Jogjakarta dan sesuai dengan PP nomor 3 tahun 1950. Ini juga nantinya jadi cikal bakal IAIN.

Dalam perjalanannya, sebagai upaya institusionalisasi pendidikan Islam dan mempersiapkan guru, tokoh dan pimpinan agama didirikan pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. ADIA didirikan sesuai dengan Penetapan Menteri Agama RI No.1 tahun 1950 dengan Dekan pertama adalah Mahmud Yunus dan Bustami A. Setelah membentuk ADIA, pemerintah pada tahun 1960 mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di kota Yogyakarta dengan nama IAIN Al Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah, yang merupakan gabungan dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta.

Sejak tahun 1963, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat. Pada tahun 1965, nama IAIN di Yogyakarta diubah menjadi IAIN Sunan Kalijaga. Pada abad ke-21, sejumlah IAIN berubah nama menjadi universitas Islam Negeri (UIN), karena memiliki fakultas dan jurusan di luar studi keislaman. IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta

misalnya, berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kemudian seiring dengan perkembangannya tahun 2022 jumlah IAIN di Indonesia sebanyak 29 empat diantaranya dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini, diantaranya Institut Agama Islam Negeri Manado, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Institut Agama Islam Negeri Bone, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Berikut masing-masing penjelasan lahirnya berdasarkan Surat Keputusan.

IAIN Manado: Pada tahun 1990, IAI Manado diasiliasikan dengan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin (sekarang UIN) Makassar. Sejak tahun 1994, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin menempati lokasi permanen di daerah Perkamil dan tidak lagi menumpang di gedung PGAN Manado. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 1997, Fakultas Syari'ah Filial IAIN Alauddin ini menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado dan resmi terpisah dari lembaga induknya, yakni IAIN Alauddin Makassar.

Sejak tahun 1997, STAIN Manado menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Utara. Setelah beroperasi kurang lebih 18 tahun lamanya, pada bulan November tahun 2015, STAIN Manado beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 147 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

IAIN Parepare: Perubahan status dari Fakultas Tarbiyah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare merupakan tuntutan dalam dunia pendidikan yang semakin kompetitif serta desakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Islam dalam menghadapi persaingan global yang penuh tantangan. Berdasarkan Kepres No. 11 Tahun 1997 sebagaimana yang disebutkan di atas, maka status Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin berubah menjadi STAIN Parepare disusul Keputusan Menteri Agama No. 338 Tahun 1997 tentang status STAIN dan pedoman peralihan status Fakultas Tarbiyah dalam lingkungan IAIN di daerah menjadi STAIN, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan STAIN serta Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 305/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Parepare. Sekarang ini, STAIN Parepare senantiasa secara terus menerus melakukan peningkatan pengelolaan, melakukan pembenahan secara intens, dengan membangun infrastruktur, sarana dan prasarana, perluasan area kampus dengan tetap mengutamakan peningkatan kualitas

pengelolaan kelembagaan, mahasiswa dan lulusanya. Upaya capaian kualitas lulusan sebagaimana dicanangkan, dilaksanakan dengan proses pembenahan struktur organisasi secara struktural dan non-struktural. Sementara peningkatan akademik, dilakukan dengan pembenahan seluruh komponen yang terkait dengan proses pembelajaran, utamanya peningkatan sarana-prasana penunjang dan pengelolaan kurikulum perkuliahan pada masing-masing jurusan. Akhirnya, wujud nyata kemajuan ditunjukkan dengan langkah Transformasi STAIN Menjadi IAIN Parepare secara resmi melalui Peraturan Presiden RI Joko Widodo Nomor 29 tanggal 5 April 2018, dan diresmikan oleh menteri agama H. Lukman Syaifuddin.

IAIN Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone mempunyai sejarah tersendiri, diawali dari sebuah Universitas Islam Raya Bone pada tahun 1964. Pada tahun 1967 berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Makassar di Watampone sebagai kelas filial dari Fakultas Syariah IAIN Alaudin Makasan berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Ujung Pandang Nomor 14 Tahun 1967 tertanggal 14 Juli 1967. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1968 berubah menjadi Fakultas Syariah Cabang IAIN Alaudin Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 166 Tahun 1968,

dengan penkhususan menyelenggarakan program Sarjana Muda.

Berdasarkan perkembangan politik dan sistem pemerintahan, tahun 1997 Fakultas Syariah Cabang IAIN Alauddin Ujung Pandang berubah secara kelembagaan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 290-323 tahun 1997, selanjutnya dijabarkan lebih detail dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor B/136/1997 tentang Perubahan bentuk Fakultas Syariah Watampone menjadi STAIN Watampone. Berdasarkan Peraturan Presiden No 23 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo STAIN Watampone beralih bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Bone. Peraturan presiden ini diundangkan tanggal 7 April 2018 dan tercatat pada lembaran negara tahun 2018 no. 46.

IAN Gorontalo: Pada tahun 1972, terjadi perubahan dimana kedua universitas tersebut diintegrasikan dan berubah nama menjadi Universitas 23 Januari Gorontalo. Pada tahun itu juga (1972), sejumlah tokoh Islam dan tokoh masyarakat Gorontalo bersepakat untuk

mengupayakan Fakultas Tarbiyah UIG diusulkan kepada Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang agar dijadikan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Filial Gorontalo. Usul tersebut direspon dengan keluarnya Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang Nomor: B-II/SK/68/1972 tanggal 3 Agustus 1972 yang berlaku tanggal 2 Januari 1972 tentang Pengukuhan Berdirinya Fakultas Tarbiyah menjadi Filial Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo mengalami perkembangan setiap tahunnya, peralihan status dari kelas filial 1969, selanjutnya tahun 1996 beralih status menjadi STAIN dan pada tahun 2004 beralih menjadi IAIN.

B. ANALISIS KELAYAKAN

Data utama yang disajikan untuk menganalisis kebijakan anggaran, biaya operasional, kinerja program studi, dan tingkat akreditasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di wilayah sulawesi dan Gorontalo, yakni Institut Agama Islam Negeri Manado, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Institut Agama Islam Negeri Bone, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Program Studi

No.	Program Studi	Perguruan Tinggi	Tingkat Akreditasi
1	Pendidikan Agama Islam	IAIN Manado	A
2	Pendidikan Bahasa Arab	IAIN Manado	B
3	Tadris Bahasa Inggris	IAIN Manado	B
4	Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah	IAIN Manado	B
5	Hukum ekonomi syariah	IAIN Manado	B
6	Ekonomi Syariah/B	IAIN Manado	B
7	Ilmu Alquran dan Tafsir	IAIN Manado	B
8	Sosiologi Agama	IAIN Manado	B
9	Pendidikan Agama Islam (S2)	IAIN Manado	B
10	Ekonomi Syariah (S2)	IAIN Manado	B
11	Komunikasi Penyiaran Islam	IAIN Bone	B
12	Pendidikan Bahasa Arab	IAIN Bone	BAIK
13	Sejarah Peradaban Islam	IAIN Bone	B
14	Pendidikan bahasa Inggris	IAIN Bone	B

15	Pendidikan Agama Islam	IAIN Bone	B
16	Ekonomi Syariah (S2)	IAIN Bone	BAIK
17	Komunikasi Penyiaran Islam	IAIN Parepare	B
18	Pendidikan Bahasa Arab	IAIN Parepare	B
19	HTN (Siyasah Syar'iyah)	IAIN Parepare	B
20	Komunikasi Penyiaran Islam	IAIN Parepare	B
21	Hukum Keluarga Islam	IAIN Parepare	BAIK
22	Ilmu Alquran dan Tafsir	IAIN Parepare	B
23	Hukum Keluarga Islam (S2)	IAIN Parepare	BAIK
24	Perbankan syariah	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
25	Ekonomi syariah	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
26	Hukum Keluarga	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
27	Hukum Ekonomi syariah	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
28	Komunikasi Penyiaran Islam	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
29	Ilmu Alquran dan Tafsir	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B

30	Aqidah Filsafat Islam	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
31	Pendidikan Agama islam	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
32	Manajemen Pendidikan Islam	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
33	Tadris Bahasa Inggri	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
34	Pendidikan bahasa Arab	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
35	Pendidikan Agama Islam (S2)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B
36	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	B

BAB VIII

DAMPAK KEBIJAKAN ANGGARAN DAN BIAYA OPERASIONAL

A. KEBIJAKAN ANGGARAN TERHADAP TINGKAT AKREDITASI

Pada uji hipotesis dijelaskan pada tingkat probabilitas atau signifikan sebesar 0,537 menunjukkan bahwa kebijakan anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat akreditasi. Hal ini diartikan bahwa kenaikan dan penurunan kebijakan anggaran tidak mempengaruhi tingkat akreditasi. Mengapa?

Kebijakan anggaran merupakan kebijakan di bidang fiskal yang membandingkan antara nilai penerimaan dan pengeluaran, sehingga kebijakan anggaran di perguruan tinggi juga mempertimbangkan antara jumlah dana yang dikumpulkan baik melalui pembiayaan murni maupun melalui PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam hal ini adalah pembayaran UKT oleh mahasiswa, kemudian

anggaran tersebut dialokasikan sesuai dengan pos pos pembiayaan belanja selama 1 tahun fiskal.

Pengalokasian anggaran disalurkan kepada masing-masing fakultas, lembaga dan unit yang seringkali terjadi perbedaan jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran yang diterima oleh fakultas, lembaga dan unit sebagai pengusul yang memungkinkan berakibat pada perubahan program kerja.

B. BIAYA OPERASIONAL TERHADAP TINGKAT AKREDITASI

Pada uji hipotesis dijelaskan pada tingkat probabilitas atau signifikan sebesar 0,001 menunjukkan bahwa biaya operasional memberikan pengaruh terhadap tingkat akreditasi. Hal ini diartikan bahwa semakin besar biaya operasional maka tingkat akreditasi semakin naik. Temuan ini didukung oleh beberapa argumen.

Pertama, biaya operasional merupakan sekelompok biaya yang telah dialokasikan untuk membiayai sejumlah program yang telah ditetapkan oleh program studi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RA-AKL), sehingga kecukupan biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan akreditasi sangat dibutuhkan, karena dalam pemenuhan dokumen membutuhkan berbagai

proses atau tindakan dalam bentuk kegiatan yang dibiayai sesuai dengan alokasi penganggaran yang telah disusun.

Kedua, berlakunya teori produksi yang ditemukan oleh David Ricardo (1965) *menekankan bahwa adanya kesatuan antara input proses output. Dimana setiap penambahan input maka output semakin meningkat, artinya semakin banyak input dalam hal ini biaya operasional yang disiapkan, maka peluang untuk meningkatkan akreditasi semakin tinggi.*

C. KEBIJAKAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PRODI

Pada uji hipotesis dijelaskan pada tingkat probabilitas atau signifikan sebesar 0,239 menunjukkan bahwa kebijakan anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja prodi. Hal ini diartikan bahwa kenaikan dan penurunan kebijakan anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja prodi. Mengapa?

Kebijakan anggaran yang berhubungan dengan kebijakan fiskal, dengan membandingkan antara nilai penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan anggaran yang merupakan bagian dari peningkatan kinerja dalam regulasi yang ditetapkan dalam hal ini pembayaran tunjangan merupakan *fixed cost*.

D. BIAYA OPERASIONAL TERHADAP KINERJA PRODI

Pada uji hipotesis dijelaskan pada tingkat probabilitas atau signifikan sebesar 0,000 menunjukkan bahwa biaya operasional memberikan pengaruh terhadap kinerja prodi. Hal ini diartikan bahwa semakin besar biaya operasional maka kinerja prodi semakin tinggi. Temuan ini didukung oleh beberapa argumen.

Pertama, biaya operasional merupakan sekelompok biaya yang digunakan untuk operasional prodi, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan dukungan biaya yang tersedia. Realisasi program kerja yang diukur dengan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.

Kedua, Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donelly, Gibson and Ivancevich, 1994), dan Kinerja adalah tingkat keberhasilan yang dimiliki setiap orang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah diberikan kepadanya yang melekat sebagai tanggung jawab.

E. KINERJA PRODI TERHADAP TINGKAT AKREDITASI

Pada uji hipotesis dijelaskan pada tingkat probabilitas atau signifikan sebesar 0,000 menunjukkan bahwa kinerja prodi memberikan pengaruh terhadap tingkat akreditasi. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi kinerja prodi maka tingkat akreditasi semakin tinggi. Temuan ini didukung oleh beberapa argumen.

Pertama, kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blanchard, 1993). Dan Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donnelly, Gibson and Ivancevich, 1994).

Kedua, kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan kepercayaan dalam melakukan proses tindakan dalam bentuk kegiatan sehingga pemenuhan dokumen instrumen akreditasi

terencana dengan baik dan terstruktur dalam mendukung peningkatan nilai akreditasi secara maksimal.

BAB IX

KEBERLANJUTAN UNTUK

Masa Depan

Berdasarkan analisa yang telah didapatkan maka tindaklanjut dan implementasi dari kebijakan anggaran dan biaya operasional perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Kebijakan anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat akreditasi yang ditunjukkan pada tingkat probabilitas atau signifikan sebesar 0,537.
2. Biaya operasional memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat akreditasi yang ditunjukkan pada tingkat probabilitas atau signifikan sebesar 0,001
3. Kebijakan anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja prodi yang ditunjukkan pada tingkat probabilitas atau signifikan sebesar 0,239
4. Biaya operasional memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja prodi yang ditunjukkan pada tingkat probabilitas atau signifikan sebesar 0,000

5. Kinerja prodi memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat akreditasi yang ditunjukkan pada tingkat probabilitas atau signifikan sebesar 0,000
6. Disarankan kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) khususnya IAIN untuk dapat mengalokasikan biaya operasional dengan jumlah yang cukup karena, alokasi biaya operasional dapat meningkatkan nilai akreditasi. Kecukupan biaya operasional juga dapat meningkatkan kinerja prodi karena Realisasi program kerja yang diukur dengan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.
7. Perguruan tinggi juga harus memperhatikan indikator yang dapat meningkatkan kinerja prodi berupa kebutuhan fisik dan fasilitas karena kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan kepercayaan dalam melakukan proses tindakan dalam bentuk kegiatan sehingga pemenuhan dokumen instrumen akreditasi terencana dengan baik dan terstruktur dalam mendukung peningkatan nilai akreditasi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amany, T. S., Maharani, D. P., & Firmansyah, A. (2020). Peran Pendapatan dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara)*, 2(1), 78-89.
- Ardiansyah, F. (2020). Kebijakan Fiskal. *Kebijakan Fiskal*.
- BELLA, N. R., Erina, L., & Effendi, S. (2020). Analisis Prinsip-Prinsip Penganggaran Pemeliharaan Jalan Di Wilayah I Dan Ii Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Casmadi, Y., & Azis, I. (2019). Pengaruh Biaya Produksi & Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 41-51.
- Dormady, N., Roa-Henriquez, A., & Rose, A. (2019). Economic resilience of the firm: A production theory approach. *International Journal of Production Economics*, 208, 446-460.
- Effendi, E. (2018). Pengaruh Kinerja Manajemen Mutu, Manajemen Pemasaran dan 40Audit Internal Terhadap Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit Swasta Di Pekan Ba41ru. *Jurnal Kompetitif*, 7(2).
- Fauzi, A. (242020). *Manajemen Kinerja*. Airlangga University Press.

- Jumirin, J., & Lubis, Y. (2018). Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 162-177.
- Kurnia, K. (2021). Efisiensi Pengelolaan Keuangan dalam Meningkatkan Optimalisasi Fasilitas dan Jasa Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(4), 463-475.
- Legowo, M. B., & Indiarto, B. (2017). Model Sistem Penjaminan Mutu Berbasis Integrasi Standar Akreditasi BAN-PT dan ISO 9001: 2008. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 1(2), 90-98.
- Massie, R. N., Areros, W. A., & Rumawas, W. (2018). Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor pengelola It Center Manado. *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB)*, 6(002).
- Meyer-Rath, G., Campos, N. G., Miot, J., & Lince-Deroche, N. (2020). The Value of Different Types of Economic and Budget Analysis for Informing Real World Decision Making: the Case of Cervical Cancer Screening in South Africa.
- Nuraeni, A. S. I. (2019). Implementasi Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara. *Katalogis*, 5(11).
- Nursam, N. (2017). Manajemen Kinerja. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2).

- Pasca, Y. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Usaha dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Survey Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 163-173.
- Pebrianti, S., & Aziza, N. (2018). Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 292.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- Prakoso, D. T. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Divisi Dibawah Direktur Operasi Pt Pindad (*Persero Bandung*)) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Raharjo, T., & Sulaeman, A. S. (2019). Pembuatan Rencana Anggaran Biaya bagi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tangerang. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3..
- Rialmi, Z., & Morsen, M. (2020). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Utama Metal

Abadi. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 3(2), 221-227.

Rubin, Irene S, 1990., *From the Politics of Public Budgeting*, Boston, Chatam Haouse Publisher.

Santoso, S. (2016). "Analisis SEM Menggunakan Amos". Jakarta: Elex Media Komputindo.

Styaningsih, Y. A. (2018). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada Pt. Jerindo Jaya*.

Sugiyono, P. D. (2015). "Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Indonesia": ALFABETA.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011

PROFIL PENULIS



Dr. Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.

Tempat/Tgl Lahir : Labekkan, 9 Juli 1975
Bidang Kepakaran : Akuntansi
Alamat : Perum. Malendeng Residence, Blok F No.
5 Kec. Paal Dua, Manado, 95128
Email : ridwantabe@iain-manado.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2002	Sarjana (S1)	Universitas Negeri Makassar	Ekonomi/Akuntansi
2007	Magister (S2)	PPS Universitas Muhammadiyah Jakarta	Ekonomi/Akuntansi
2022	Doktor (S3)	Universitas Sam Ratulangi Manado	Manajemen Keuangan

BUKU YANG DITERBITKAN

1. Pengantar Akuntansi (Teori Dan Praktik Pada Perusahaan Dagang), Tahun 2014
2. Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama, Tahun 2021
3. Akuntansi Dan Laba Aplikasi Pada UMKM, Tahun 2022
4. Akuntansi Manajemen Aplikasi Perbankan di Indonesia, Tahun 2023